

**PENULISAN HUKUM
INSKONSISTENSI PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI
GENERALI* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURI
HASIL PERKEBUNAN**



Diajukan oleh :

GRACE MARGARETH THERESIA

NPM : 210514358

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**INSKONSISTENSI PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI
GENERALI* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURI
HASIL PERKEBUNAN**



**Diajukan oleh :
GRACE MARGARETH THERESIA**

**NPM : 210514358
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 12 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Aryadi'.

G. Aryadi, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
INSKONSISTENSI PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI
GENERALI* DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURI
HASIL PERKEBUNAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	12 Agustus 2025
Tempat	:	Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua	:	Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.
Sekretaris	:	G. Aryadi S. H., M.H.
Anggota	:	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof Dr. Theresia Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Inkonsistensi Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencuri Hasil Perkebunan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Fakultas Hukum. Penulisan hukum ini merupakan bahasan tentang adanya upaya penegakan hukum di Indonesia dan perlindungan terhadap hasil perkebunan. Penulis merasa bahwa pelaksanaan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hasil perkebunan di Indonesia dapat dijawab dari teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang dipelajari oleh penulis di Program Kekhususan Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Arif Suyitno S.H., selaku Senior Executive Humas PT.

Adei Plantation & Industry yang pada penulisan skripsi ini telah berperan sebagai narasumber yang memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk mengakses dan menganalisis Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls, yang merupakan salah satu sumber data utama dalam penelitian ini. Terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Goklip Hasibuan dan Ibu Florida Hutasoit selaku orangtua, Maria Anggreini Hasibuan dan Samuel Edward Tio Martua Hasibuan selaku adik daripada penulis skripsi ini yang telah mendoakan dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
5. Michelle. Mita, Isti, Naya, Erlina, dan Kak Intan yang menemani keseharian saya, mendengarkan cerita saya dan memberi semangat serta masukan selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi dalam proses penulis menulis skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik

Penulis sadar bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi penulis.

Yogyakarta, 12 Agustus 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Theresia' with a stylized flourish above it.

Grace Margareth Theresia

ABSTRACT

*This research discusses the consistency of law enforcement against theft of plantation products in Indonesia with a focus on Case Study Decision Number 59/Pid.C/2023/PN Bls. The background of this research is the rampant cases of theft of plantation products that affect the economic sector and discrepancies in the application of applicable laws. This study found that in practice, law enforcement officials often use general articles in the Criminal Code (KUHP), such as Article 364 on petty theft, to ensnare perpetrators of theft of plantation products, even though there is a special regulation in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. This inconsistency is considered to ignore the principle of *lex specialis derogat legi generali*, where special rules should override general rules. In addition, the judge's consideration in handing down the verdict also included juridical and non-juridical aspects, taking into account the legal facts at trial and the condition of the defendant. This research recommends the need for further socialization of the Plantation Law and increased legal awareness among law enforcement officials to realize legal certainty and justice in similar cases.*

Keywords: Consistency of Law Enforcement, Theft of Plantation Products, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Judge Considerations.

ABSTRAK

*Penelitian ini membahas konsistensi penegakan hukum terhadap pencurian produk perkebunan di Indonesia dengan fokus pada Putusan Perkara Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls. Latar belakang penelitian ini adalah maraknya kasus pencurian produk perkebunan yang berdampak pada sektor ekonomi dan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menggunakan pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti Pasal 364 tentang pencurian kecil, untuk menjerat pelaku pencurian produk perkebunan, meskipun terdapat peraturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Ketidakkonsistenan ini dianggap mengabaikan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus harus mengesampingkan aturan umum. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mencakup aspek yuridis dan non-yuridis, dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan kondisi terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perkebunan dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kasus serupa.*

Kata kunci: Konsistensi Penegakan Hukum, Pencurian Produk Perkebunan, Lex Specialis Derogat Legi Generali, Pertimbangan Hakim.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	17
G. Metode Penelitian	19
BAB II	24
A. Penegakan Hukum Pidana	24
1. Penegakan Hukum dan Upaya Penegakan Hukum	24
2. Tindak Pidana Pencurian dan Jenis Pencurian	28
B. Tindak Pidana dibidang Perkebunan	34
1. Perkebunan dan Dasar Hukum Perkebunan	34
2. Tindak Pidana dibidang Perkebunan	37
C. Penegakan Hukum terhadap Pencurian Dibidang Perkebunan	42
1. Pertimbangan Hakim dan asas <i>Lex Specialis Derogate legi Generali</i>	42
2. Putusan Nomor 59/Pid.C/2023/PN Bls	49
BAB III	57
A. Simpulan	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Melalui pernyataan ini, penulis menegaskan bahwa skripsi ini adalah karya asli yang dibuat oleh penulis sendiri, dan tidak merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Apabila terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil duplikasi atau plagiasi, penulis siap untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Grace Margareth Theresia